



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Respon

Respons dikatakan Darly Beum sebagai tingkah laku balas atau sikap yang menjadi tingkah laku adekuat. Sementara itu Scheerer menyebutkan respons merupakan proses pengorganisasian rangsang dimana rangsang-rangsang prosikmal di organisasikan.²¹ Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi berbicara mengenai respon atau tidak respon tidak terlepas dari pembahasan sikap.

Respon pramudi (supir) juga diartikan suatu tingkah laku pramudi atau sikap yang berwujud baik sebelum ada pemahaman yang mendetail mengenai penilaian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Melihat sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu maka akan diketahui bagaimana respon mereka terhadap kondisi tersebut. Menurut Louis Thursone, respon merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan, dan prasangka, pra pemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa cara pengungkapan respon atau sikap dapat melalui:²²

²¹Sarwono, *Teori Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 28

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 1) Pengaruh atau penolakan
- 2) Penilaian
- 3) Suka atau tidak suka
- 4) Kepositifan atau kenegatifan suatu objek psikologi

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci objek tertentu.

Perilaku dalam bentuk respon dibagi menjadi dua yaitu:²³

1. Perilaku tertutup

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka

Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.

²³<http://blogspot.co.id>, *Bentuk-bentuk-perilaku-dan-proses*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Respon adalah tanggapan atau penjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Sedang menurut Kamus Inggris Indonesia yaitu menjawab, membalas, menanggapi atau memberi reaksi.²⁴

B. Upah Secara Umum

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi, upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.²⁵

Gaji didefinisikan sebagai balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan.²⁶ Menurut Gito Sudarmo penggajian harus memperhatikan peraturan pemerintah, seperti ketentuan tentang upah minimum regional idealnya gaji yang diberikan organisasi di atas ketentuan pemerintah, gaji yang memadai yang diterima oleh pekerja akan menimbulkan ketentraman dalam bekerja dan mereka tidak diperlakukan macam-macam.

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah N0. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum

²⁴John M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1989), cet. ke – XXV, h. 481

²⁵Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-1, h. 799

²⁶*Ibid.* h. 812

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regional, dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan. Sedangkan upah pokok minimum diartikan upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokok saja dan tidak termasuk tunjangan.²⁷

Berdasarkan definisi di atas maka position paper menetapkan definisi upah minimum sebagai upah permulaan yang diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal.

Adapun upah menurut Islam adalah pemberian atas suatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut *ju'alah* adalah suatu bentuk suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.²⁸

Pengertian upah menurut peraturan pemerintah 08/1981 yaitu suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau perusahaan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dengan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau perusahaan dengan karyawan itu sendiri maupun untuk keluarga.

²⁷ Soni Sumarsono, *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet. ke-1, h. 181

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), cet. ke - 6, h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan istilah upah ialah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.²⁹

Jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan atau pun dalam suatu organisasi kerja, dimana upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang sehubungan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhan.

2. Upah Nyata

Yang dimaksud dengan upah nyata ini ialah upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak, upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima, besar kecilnya biaya hidup yang

²⁹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke - 1, h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang tersebut.

3. Upah Hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang buruh itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki gizi yang lebih baik.

4. Upah Minimum

Sebagaimana pendapat yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Bertitik tolak dari hubungan formal ini haruslah tidak dilupakan bahwa seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya kalau buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan perlindungan yang layak. Dalam hal ini maka upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh itu beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang serba sederhana³⁰.

Adapun tujuan utama penentuan upah minimum yaitu:³¹

- a. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- b. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan keadaanya secara material kurang memuaskan.

³⁰G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafida, 1986), cet.ke-1, h. 93

³¹*Ibid.* h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.
- d. Mengusahakan terjaminnya atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan

5. Upah Wajar

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan buruh dengan keluarganya.³²

Menurut dewan penelitian batasan pengupahan, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yaitu berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut sesuatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan di bayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja dan penerima kerja. Jadi dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan secara jelas mengandung maksud yang sama yaitu bahwa upah merupakan pengganti jasa yang telah diserahkan atau dikerahkan oleh seseorang kepada pihak lain.

³²*Ibid. h. 100*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun upah buruh mempunyai kedudukan yang istimewa, hal ini tertera dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepailitan yang berlaku, pasal 27 peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981.
- b. Apabila buruh jatuh pailit, maka upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi dari 25% seluruh jumlah upah buruh, pasal 28 peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981.³³

C. Dasar Hukum Upah

Dalam fiqh muamalah, upah termasuk ke dalam pembahasan tentang *ijarah*. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.³⁴

Ulama yang membolehkan akad *jualah* bersepakat bahwa akad ini adalah akad yang tidak mengikat, berbeda dengan akad *ijarah*. Oleh karena itu dibolehkan bagi *jail* (pembuat akad) dan *amil* (pelaksana akad) membatalkan

³³Djumialadji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), cet. ke - 1, h. 54

³⁴Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beiru : Dar al- Fikr, 1983), cet. ke - 1, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad *jualah* ini. Pembatalan ini terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dari segi waktu pembatalan akad ini.

Buruh harus memiliki kesadaran bekerja bukan semata-mata merupakan objektivitas diri manusia untuk mengangkat harga diri dan martabatnya, tetapi juga sadaran eksistensinya. Kesadaran buruh atas eksistensinya yang kini semakin membucah hurus benar-benar dijaga pertumbuhannya agar mampu membuahkan hasil berupa kesejahteraan buruh dalam arti lahir dan batin, meskipun kedua-duanya sangat sulit diperbolehkan sekaligus, barang kali harus benar-benar dikembangkan adalah kesadaran akan persoalan utama buruh yaitu upah agar minimal sama dengan produktivitas yang dihasilkan untuk perusahaan.³⁵

Dari uraian diatas bahwa upah (*al-ijarah*) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para fuqaha telah menilai bahwa ijarah ini suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong antara sesama manusia.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi:”tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerjaan atas jasa yang diberikan haruslah upah yang wajar.³⁶

³⁵Eggi Sudjana, *Op.Cit*, h. 81

³⁶Abner Hutabarat, *Kebijakan Upah Minimum*, (Jakarta : 1984), cet. ke - 1, h. 13

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketetapan MPR. NO. 1V /MPR/1978 disebutkan kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditunjukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh.

Aturan tentang besaran potongan upah atau denda karena ketidak hadiran atau karena alasan lain diatur dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama. Namun, pemotongan upah pekerja tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi “perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam pemotongan upah tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima”.³⁷

Dalam syari’at Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam al-Qur’an maupun sunnah Rasul sebagai berikut:

1. Surat al- Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.”³⁸

2. Surat al-Qashash ayat 26 yang berbunyi:

³⁷Umar Kasim, “Pemotongan gaji”, artikel diakses pada tanggal 3 Maret 2015

³⁸Departemen Agama RI, *al- Quran dan Terjemah*, (Bandung : al- Hikma, 2009), cet. ke-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Salah seorang dari wanita itu berkata : “Wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”*³⁹

3. Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya:”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.⁴⁰

Maksud hadits di atas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan janganlah menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yang dibolehkan.

Memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang diupah tidak berkurang nilainya, seperti: memberi upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang menyewa rumah dan dalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai yang disewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau diambil anaknya sebab yang demikian mengurangi nilainya.

Upah (*ijarah*) itu berlaku umum atas setiap aqad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil. Pada garis besarnya *ijarah* itu terdiri dari : pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari

³⁹ Ibid. h. 389

⁴⁰ Ahmad Taufik Abdurrahman, *Sahih Sunnah Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Cet. ke-2, h. 420

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu *'ain* (benda), seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs* (pekerja), seperti seorang nelayan. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* ini, mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

D. Sistem Pembayaran Upah

Menurut hukum positif penentuan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:⁴¹

1. Sistem upah jangka waktu

Menurut sistem pembayaran ini, upah ditentukan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan setegas-tegasnya oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

2. Sistem upah potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil

⁴¹ Imam Soeporno, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 1985), Cet. ke-7, h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya buruh tersebut. Maka sistem pengupahan itu tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

3. Sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, membongkar dan mengangkut barang-barang dan sebagainya, tetapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan pada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.

4. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran diluar Negri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang turun terus menerus yang akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

5. Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun, menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penentuan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.

Menurut Islam sistem pembayaran upah pada zaman Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum musliman setelahnya, yakni pembayaran upah bagi para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah memberi petunjuk bahwa dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaannya, dan memberikan keterangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Selain itu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayar upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Demikian juga upah yang dibayarkan kepada para pekerja boleh dibayarkan berupa uang, barang, atau binatang ternak.⁴²

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), cet. ke- 1, h. 202

E. Pemotongan Upah

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa perselisihan itu merupakan masalah yang umum dalam kehidupan manusia, dalam setiap interaksi tertentu akan terdapat reaksi. Begitu di perusahaan yang merupakan lingkungan masyarakat pekerja tertentu, hubungan perburuhannya pun tidak terlepas dari pengertian di atas dan suatu kebijaksanaan pengusaha yang telah dipertimbangkan dengan matang, akan diterima oleh para karyawan dengan rasa puas dan ada pula yang kurang puas.⁴³

Selain itu di dalam perusahaan adanya istilah upah kotor, upah kotor merupakan gaji pokok dan tunjangan tetap yang kita terima sebelum dilakukan pemotongan pemotongan. Upah bersih didapat pekerja setiap bulan, perbedaan adanya upah kotor dan upah bersih disebabkan adanya pemotongan-pemotongan upah seperti:⁴⁴

1. Pemotongan pajak penghasilan

Jadi perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak dari gaji kotor karyawan jumlah pajak penghasilan yang harus dipotong, besarnya tergantung dari:

- Jumlah penghasilan kotor karyawan
- Status perkawinan
- Adanya penghasilan yang tidak boleh dikenakan pajak penghasilan
- Tarif pajak yang berlaku

⁴³G. Kastapoetra, R. G. Kastapoetra, A. G. Kastapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1986), cet. ke - 1, h. 93

⁴⁴Markus Sidauruk, *Pertanyaan Mengenai Upah Karyawan*, di akses pada tanggal 10 Mei 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemotongan pembayaran iuran jaminan sosial

Pemotongan upah pekerja karena suatu pembayaran terhadap negara atas iuran keanggotaan atau peserta untuk suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara hukum pemotongan tersebut merupakan kewajiban dari pekerja.

3. Pemotongan lainnya seperti

a. Pemotongan upah karena absen tanpa alasan yang jelas

Secara hukum, apabila pekerja tidak bekerja maka upah tidak dibayar, namun pemotongan upah pekerja yang tidak masuk kerja tidak dapat dilakukan begitu saja, karena berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang berisikan bahwa pekerja dilindungi haknya untuk mendapatkan upah penuh untuk hari-hari tidak masuk kerja karena sakit, menjalankan cuti yang karena haknya, antara lain dalam hal menikahkan anaknya, sedang haid bagi perempuan, atau ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

b. Pemotongan upah karena pekerja melakukan pelanggaran

Pemotongan upah mengenai denda dan pelanggaran yang dilakukan pekerja dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis dan perjanjian perusahaan, sementara itu pemotongan upah pekerja tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu pemotongan upah yang terjadi di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru telah diatur dalam perjanjian kerja tertulis pasal (3) ayat(5) yang berbunyi setiap jadwal datang dan pulang kerja, wajib mengisi absen sebelum waktu kerja ditetapkan, dan apabila terlambat maka akan dipotong upah atau gajinya sebesar Rp.100.000/hari, sementara itu pemotongan upah hanya 10% dari upah yang seharusnya diterima oleh pekerja setiap bulannya.⁴⁵

Pemotongan upah menurut Islam pada zaman sekarang yaitu pemotongan zakat penghasilan atau gaji, salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.⁴⁶

Profesi dalam islam dikenal dengan istilah *al-kasb* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal fikiran maupun jasa. Defenisi lain profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi)

⁴⁵Perjanjian Kerja, PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru, Tahun 2014-2015

⁴⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-1, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan *hirfah* (wirasuasta). Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin. Oleh karena itu, jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.⁴⁷

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta investasi atau modal.

Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat profesi sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.

Dengan demikian contoh-contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:⁴⁸

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta maupun milik pemerintah.
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu seperti dokter, pengacara, akuntan dan lain sebagainya.

⁴⁷ *Ibid.* h. 54

⁴⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Putra Grafika, 2006), cet. ke-1, h. 77